

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 06  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Monitoring dan evaluasi kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial  
Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 34 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI;  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (Sekretaris Jenderal);  
2. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); dan  
3. Dr. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)  
beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial benar dan tepat diberikan kepada masyarakat prasejahtera yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, sehingga tujuan Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan serta menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
2. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar konflik agraria yang terjadi terkait dengan kawasan hutan dapat segera diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal.
3. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS).
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan program Perhutanan Sosial dengan pembangunan demplot untuk tanaman kehidupan unggulan di setiap provinsi dengan luas sekurang-kurangnya 100 ha.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**VIVA YOGA MAULADI, M.SI.**  
**A-493**

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN,

Ttd.

**Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM.**

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.**

DIREKTUR JENDERAL  
PERHUTANAN SOSIAL DAN  
KEMITRAAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

**Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.**

